

1.1.2 Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					
			Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	Kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Dokumen Naskah Akademi dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah. Dengan anggaran sebesar Rp. 150.322.000,-	Dokumen Naskah Akademi dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah belum selesai 100%. Dengan Realisasi Anggaran Sebesar Rp. 135.947.250,-	Dengan keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 91/PUU-XVIII/2021, tersebut dalam Amar Putusan Nomor 7 "Menyatakan untuk menengguhkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja." Sehingga kegiatan Diskusi Publik yang awalnya akan dilaksanakan di Kabupaten Dharmasraya dengan menghadirkan Masyarakat tidak dilaksanakan.	Diskusi Publik dilaksanakan dengan hanya menghadirkan OPD terkait sampai dengan adanya Peraturan lanjutan setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 91/PUU-XVIII/2021.	
			Perka BKPM No. 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan RUPMP dan RUPMK	Kegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Pengembangan Penanaman Modal Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Dharmasraya Dengan anggaran sebesar Rp. 94.073.800	Dokumen Pengembangan Penanaman Modal Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Dharmasraya selesai 100% Dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 93.085.200	Dokumen RUPM Kabupaten Dharmasraya ini belum ada Peraturan Bupati Dharmasraya	Percepatan pembuatan Peraturan Bupati untuk Dokumen RUPM Kabupaten Dharmasraya	
				PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL					
			Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal	Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Promosi Potensi Investasi dan Sumber Daya Unggulan Kabupaten Dharmasraya agar dikenal pada level nasional maupun internasional dan adanya investor yang berinvestasi di Kabupaten Dharmasraya. Dengan anggaran sebesar Rp.650.391.750,-	Promosi Potensi Investasi dan Sumber Daya Unggulan Daerah pada Kegiatan APKASI Otonomi Expo 2021 di Jakarta. Dengan realisasi anggaran sebesar Rp.635.884.329,-	Adanya keterbatasan anggaran untuk mengikuti beberapa kegiatan pameran	Adanya tambahan anggaran untuk mengikuti beberapa kegiatan pameran	

	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					
Undang-Undang Cipta Kerja dan turunannya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah	Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Sasaran dari kegiatan ini adalah Jumlah perizinan yang diterbitkan selama tahun 2021 dimana pada tahun 2021 perizinan yang terbit ditargetkan sebanyak 2000 perizinan. Dengan anggaran sebesar Rp.135.070.300,-	Kegiatan ini dapat direalisasikan sebanyak 1248 izin. Dengan Realisasi anggaran sebesar Rp.134.411.800,-	a./ Masih kurangnya pemahaman pengelola pelayanan perizinan tentang OSS, b/. Kurangnya koordinasi dengan OPD terkait maupun dengan pengelola pelayanan perizinan di tingkat provinsi. c./ Masih banyaknya pengelola pelayanan perizinan yang belum mendapatkan pelatihan (Bimtek/sosialisasi) tentang perizinan terkait dengan OSS. d./ Masih terbatasnya perangkat komputer untuk pemrosesan izin secara OSS. e./ Kurangnya sosialisasi tentang OSS kepada masyarakat atau pelaku usaha.	a./Meningkatkan kompetensi dan kemampuan aparatur atau pengelola pelayanan perizinan dengan cara mengalokasikan dana untuk mengikuti pelatihan dan bimtek baik yang diadakan oleh provinsi maupun Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). b./ Melakukan sharing atau study banding ke daerah yang sudah mendapat predikat terbaik dalam hal pelayanan perizinan agar dapat menyerap ilmunya untuk diterapkan di Kab. Dharmasraya	
Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan berbasis resiko	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					
	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Perusahaan yang akan dilakukan pemantauan sebanyak 27 perusahaan Dengan anggaran Sebesar Rp. 48.300.000	Perusahaan yang telah dilakukan pemantauan sebanyak 49 perusahaan Dengan anggaran Sebesar Rp. 48.120 000 (96,62%)	Banyak Perusahaan yang belum bisa dilakukan pengawasan	Meningkatkan Pemantauan ke pelaku usaha pada tahun 2022	
	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Pelaku usaha yang akan mendapatkan pembinaan penanaman modal melalui Bimtek dan Sosialisasi yaitu sebanyak 208 orang dengan anggaran sebesar Rp. 181.122.020	Pelaku usaha yang telah mendapatkan pembinaan penanaman modal melalui Bimtek dan Sosialisasi yaitu sebanyak 309 orang dengan anggaran sebesar Rp.141.918.848 (78,31%)	Masih ada perusahaan / pelaku usaha yang belum di lakukan Pembinaan bimtek /sosialisasi ke pelaku usaha dan Tertag Investasi yang tinggi dari BKPM Masih banyak pelaku usaha yang belum mengerti tentang tatacara pengisian LPKM Online Honor Pendamping hanya 6 bulan	Meningkatkan pembinaan bimtek / sosialisasi ke pelaku usaha pada tahun 2022 Mengusulkan agar honor pendamping di bayarkan sebanyak 12 bulan	
	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Perusahaan/pelaku usaha yang akan dilakukan pengawasan sebanyak 55 perusahaan Dengan anggaran Sebesar Rp. 96.600.000	Perusahaan/pelaku usaha yang telah dilakukan pengawasan sebanyak 102 perusahaan Dengan anggaran Sebesar Rp. 96.590.000 (99,98%)	Masih ada perusahaan / pelaku usaha yang belum di lakukan Pengawasan	Meningkatkan Pengawasan ke pelaku usaha pada tahun 2022	

Sikabau, Januari 2022
KEPALA DPMPSTP

NALDI, S.STP, M.Si
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19820411 200012 1 002